

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pandangan penulis, dari uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan Pemerintah Kota Palopo telah sesuai dengan kaidah penyusunan yang bermakna dan rasional yang telah disepakati dalam laporan keuangan.
2. Pemerintah Kota Palopo dalam kemandiriannya Berdasarkan Rasio kemandirian Keuangan Daerah (RKED) masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah kota palopo masih sangat tinggi.
3. PAD Kota Palopo Berdasarkan Rasio Efektifitas PAD (REPAD) tergolong tidak efektif, Sebab Realisasi PAD lebih kecil daripada anggaran yang telah ditetapkan di dalam pada APBD.
4. Pemerintah Kota Palopo pada Rasio Efisiensi Keuangan daerah (REKD) pada tahun 2020,2021 dan 2023 tergolong Efisien karna nilai rasionya di bawah 100%. Sedangkan pada tahun 2022 tergolong kurang efisien dimana tingkat rasionya lebih dari 100%.

5.2 Saran

Berdasarkan Hasil Kesimpulan diatas, maka saran yang penulis ajukan antara lain

1. Pemerintah Kota Palopo harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah, yang memiliki potensi yang besar meliputi: pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif dan dunia usaha.
2. Pemerintah Kota Palopo diharapkan bisa memaksimalkan potensi yang ada agar penerimaan daerah akan meningkat dan dalam peningkatannya. Pemerintah Kota Palopo juga di harapkan akan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara tepat dan berkesinambungan untuk mencegah penyalahgunaan dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pemerintah Kota Palopo tidak harus selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Sehingga kedepannya dapat tumbuh menjadi kota yang mandiri, mampu mengelola perekonomiannya dengan baik dan benar serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dalam Melaksanakan Perannya Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) perihal Perencanaan Anggaran , penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang lebih efektif dan Efesien, maka perlu kiranya ditingkatkan dengan mengikuti berbagai pelatihan Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan akuntansi keuangan daerah sehingga diharapkan melakukan tata kelola dan keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Febriansyah, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Amiluddin, Paulus Uppun, Fitriwati Jam'an, 2013, *Analisis Deskriptif Asli Daerah Kota Palopo*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anim Rahmawati, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Surakarta.
- Chartika Melisa Pangalila, Lintje Kalangi, Novi Budiarto, 2015, *Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Dyah Puswitasari, Sri Witurachmi, Muhtar, 2013, *Analisis Perbandingan dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada APBD Desa Slemanan*, FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Eka Siwi Hidayanti, 2012, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung*.
- Halim, A., 2007, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan*, „Pengelolaan Keuangan Daerah“, Edisi Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Hony Adhiantoko, 2013, *Analisis Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ismail, M., 2004, *„Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah“*, FE Unibraw, Malang.
- Mahsun, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007, *Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*, *„Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah“*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Keempat*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Olga Yani Singkali, Retnaningtyas Widuri, 2014, *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara*, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra.
- Republik Indonesia, 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah*, Jakarta
- _____, 2005, UU Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan daerah*, Jakarta.
- _____, 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sandi Candra Saputra, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiatmaja, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja